

MANAJEMEN SEKOLAH DALAM PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DI SDN RANCAMANYAR 01

Ujang Cegi Barlian^{1*}, Sri Haryani², Desemberi Trianugrahwati³, Jajang Rusmana⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Nusantara Bandung

Corresponding Author's e-mail : ujangcepi@uninus.ac.id^{1*}, Sriharyani044@gmail.com²,
reridesemberi.rd@gmail.com³, jajang23rusmana@gmail.com⁴

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 1, No. 8 August 2023

Page: 823-831

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v1i8.743>

Article History:

Received: July, 22 2023

Revised: August, 01 2023

Accepted: August, 03 2023

Abstract : Funding management is an educational component that has a very important role in the running of the learning process at school. Implementation of education supported by adequate funding will result in optimal learning taking place. So therefore, in school management activities in managing financing at SDN Rancamanyar 01 includes several aspects, namely planning, organizing, implementing and supervising education financing. This study aims to provide an overview of (1) financing planning in improving the quality of school management, (2) organizing financing in improving the quality of school management, (3) implementing financing in improving the quality of school management, and (4) financing supervision in improving management quality. school. This is so that SDN Rancamanyar 01 can be managed effectively and efficiently, especially in managing education funding. This research is a qualitative research with a qualitative descriptive type and approach. Based on the results of the research previously described, it can be concluded that the implementation of school management in managing financing at SDN Rancamanyar 01 in preparing the budget is in accordance with management theory starting from planning, organizing, implementing, and supervising well.

Keywords : Elementary School, Funding, Management.

Abstrak : Manajemen pembiayaan menjadi komponen pendidikan yang mempunyai peran yang sangat penting atas berjalannya proses pembelajaran di sekolah. Penyelenggaraan pendidikan yang didukung dengan pembiayaan memadai akan berakibatkan pada berlangsungnya pembelajaran yang optimal. Maka oleh karena itu, dalam kegiatan manajemen sekolah dalam pengelolaan pembiayaan di SDN Rancamanyar 01 meliputi beberapa aspek yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pembiayaan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang (1) perencanaan pembiayaan dalam meningkatkan kualitas manajemen sekolah, (2) pengorganisasian pembiayaan dalam meningkatkan kualitas manajemen sekolah, (3) pelaksanaan pembiayaan dalam peningkatan kualitas manajemen sekolah, dan (4) pengawasan pembiayaan dalam meningkatkan kualitas manajemen sekolah. Hal ini mengingat agar SDN Rancamanyar 01 dapat dikelola secara efektif dan efisien khususnya dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan. Penelitian ini adalah penelitian

kualitatif dengan jenis dan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi manajemen sekolah dalam pengelolaan pembiayaan di SDN Rancamanyar 01 dalam penyusunan anggaran sesuai dengan teori manajemen yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terlaksana dengan baik.

Kata Kunci : Manajemen, Pembiayaan, Sekolah Dasar.

PENDAHULUAN

Pada masa global ini dunia pendidikan sudah mengalami beberapa perubahan yang signifikan. Pentingnya perkembangan pada ilmu teknologi dan pengetahuan cukup berkembang menyebabkan persaingan yang sangat ketat karena salah satu faktor yang mempengaruhi dalam kehidupan ialah pendidikan. Pendidikan merupakan aspek penting dari pengembangan kompetensi dan karakter sebuah negara. Keberhasilan suatu bangsa dalam mewujudkan cita-citanya dapat diukur pada jumlah penduduk terpelajarnya. Perkembangan dalam sarana teknologi dan ilmu pengetahuan adalah hubungan dan transportasi modern yang mendorong pembentukan platform yang berbeda berkaitan dengan kerjasama regional dan global, khususnya di bidang ekonomi, seperti ASEAN (Asosiasi Bangsa Bangsa Asia Tenggara), AFTA (Asosiasi Perdagangan Bebas Asia) dan WTO (Organisasi Perdagangan Dunia).

Untuk menerapkan pendidikan dalam sistem yang baik adalah pemerintah ingin meningkatkan kualitas Pendidikan yang ada di Indonesia dengan menerbitkan beberapa jenis kebijakan publik. Penetapan Standar Nasional Pendidikan adalah salah satu dari kebijakan tersebut. Standar Nasional Pendidikan mencakup: standar isi, standar kompetensi lulusan, standar sarana dan prasarana, standar tenaga pengajar dan tenaga kependidikan, standar operasional, standar proses, standar penilaian dan standar pembiayaan. Standar biaya merupakan salah satu yang mempengaruhi pencapaian tujuan pada pendidikan nasional dalam Standar Nasional Pendidikan.

Penyusunan standar pembiayaan ini mengingat pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 bahwa dalam standarisasi komponen biaya pendidikan pada standar pembiayaan yang meliputi biaya personal, biaya operasional, dan biaya investasi. Standar pembiayaan satuan pendidikan tersebut tentunya telah ditetapkan dalam peraturan Menteri berdasarkan usulan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Standar pembiayaan ini diharapkan dapat dijadikan pedoman pada semua jenjang pendidikan di seluruh Indonesia dalam penyelenggaraan pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan yang bermutu selalu dikaitkan dengan pembiayaan. Mengingat manfaat yang ada pada dana pendidikan yang dirasakan dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran siswa di kelas. Selain itu manfaatnya pun dirasa ke berbagai bidang yang begitu luas dan meresap, maka sebaiknya pembiayaan pendidikan dijadikan oleh pemerintah dan masyarakat sebagai perhatian utama. Masalah utama dalam menjalankan roda pendidikan adalah masalah pembiayaan pendidikan. Maka perlu adanya pembiayaan yang baik dalam pengolahan sehingga berpengaruh terhadap kualitas pendidikan (Supriani dalam Nurhayati, dkk., 2022). Ditambahkan juga oleh Fadhli (2017) bahwa perlu adanya usaha serius dan nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan dari berbagai pihak.

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai, **“Manajemen Sekolah dalam Pengelolaan Pembiayaan di SDN Rancamanyar 01”**.

Merujuk pada teori George R. Terry (dalam Dian, 2012) proses manajemen adalah *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (pelaksanaan) dan *Controlling* (pengawasan).

Secara bahasa, pengertian manajemen dalam bahasa Inggris adalah *"to manage"* yang memiliki arti aturan, melaksanakan, kelola. Sedangkan didalam KBBI manajemen berarti guna sumber daya manusia sangat efektif dapat mencapai tujuan. Kegiatan manajemen dilakukan

melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sebagaimana muatan pendidikan pada umumnya. Hal tersebut merujuk pada teori George R. Terry (dalam Dian, 2012) proses manajemen adalah *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (pelaksanaan) dan *Controlling* (pengawasan).

Suatu proses dalam manajemen pembiayaan guna mengoptimalkan sumber pendanaan yang ada, mengidentifikasi dana yang tersedia dan menyalurkannya sebagai sarana penunjang pembelajaran untuk merancang proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Riadi (2016) mengungkapkan bahwa fokus utama pada manajemen pembiayaan pendidikan adalah bagaimana dapat dikelola sumber dana tersebut secara profesional dengan begitu penyelenggaraan pendidikan dapat memenuhi kebutuhan yang optimal. Pengelolaan keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan sebagai suatu upaya guna memperoleh dan mengidentifikasi sumber keuangan, penggunaan dana, pelaporan, pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan dalam urusan pelayanan pendidikan (Lipham dalam Hariyanto, dkk., 2023). Lembaga pendidikan mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi dan yang ada pada semua jenjang pendidikan, merupakan unit organisasi yang membutuhkan uang dalam operasionalnya agar dapat mengerahkan seluruh sumber daya yang ada. Menurut Rofiq (dalam Arwildayanto, dkk., 2017) menyatakan bahwa uang merupakan sumber daya yang langka dan terbatas. Maka dari itu, agar tujuan pendidikan tercapai harus dikelola secara efektif dan efisien. Menurut Lipham dan Keith (dalam Rusdiana&Wardija, 2013) pendanaan juga harus dikelola sebaik mungkin, maka dari itu harus dilakukan dengan baik dalam memajemeni keuangan.

Beberapa fungsi pengelolaan keuangan meliputi perolehan dan penelitian sumber pendanaan, penggunaan dana, pelaporan, audit dan pertanggungjawaban. Manajemen keuangan sekolah adalah seperangkat kegiatan dari perkiraan anggaran, perencanaan program sekolah, dan penganggaran yang diperlukan untuk melaksanakan, menyetujui, dan menggunakan program tersebut. Menurut Sukarji (dalam Aini, 2018) pengelolaan keuangan adalah pengaturan dana yang meliputi pemilihan sumber, pengalokasian, penggunaan dan pertanggungjawaban dana yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah/madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan. Apabila dana tersedia tidak menutup kemungkinan kebutuhan tersebut akan terpenuhi guna mencapai tujuan pendidikan yang lebih efektif, efisien produktif dan relevan (Aini, 2018).

Jenis-jenis pembiayaan pendidikan dalam pengelolaan menurut Akdon, dkk. (2015) sebagai berikut:

- 1) Biaya langsung adalah biaya langsung mempengaruhi aspek dan proses pendidikan. Misalnya, gaji guru dan staf, penyediaan kesempatan belajar, IT, buku referensi untuk guru dan buku pegangan siswa.
- 2) Biaya tidak langsung (*indirect cost*) adalah biaya yang dikeluarkan oleh peserta didik, orang tua atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tidak langsung. Seperti biaya hidup, sandang, kesehatan, pangan, transportasi, perumahan dan biaya kesempatan yang hilang selama pendidikan.
- 3) Pengeluaran pribadi adalah pengeluaran keluarga membiayai biaya sekolah anak-anak mereka, termasuk kesempatan yang hilang. Biaya ini termasuk uang sekolah, biaya dan biaya lain yang dibayar secara pribadi.

Biaya sosial adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk pendidikan, termasuk biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing keluarga (biaya pribadi). Namun, tidak semua pengeluaran sosial dapat dihitung sebagai pengeluaran pribadi. Biaya ini dikeluarkan oleh pemerintah kota sebagai bagian dari partisipasi dalam pelaksanaan pelatihan.

Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengelola dana sekolah. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 48 Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa Pokok-pokok Administrasi terdiri atas:

a. Transparansi

Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan. Pengelolaan keuangan lembaga pendidikan harus transparan, artinya transparansi dalam pengelolaan keuangan, antara lain mengungkapkan dari mana sumber keuangan itu berasal dan berapa banyak,

bagaimana perincian penggunaan dan pertanggungjawabannya secara jelas sehingga memudahkan pihak yang terlibat. untuk didengar oleh kedua orang tua/wali siswa, masyarakat dan Direksi agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak-pihak tersebut dalam pengelolaan keuangan sekolah. Sehubungan dengan informasi keuangan yang dapat diketahui oleh semua pihak seperti Rencana Anggaran Belanja Pendapatan Sekolah (RAPBS).

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah penilaian oleh orang lain terhadap kondisi seseorang mengenai kualitas efektivitasnya dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah berarti semua penggunaan biaya sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana yang telah disetujui dan peraturan yang berlaku. Untuk mencapai akuntabilitas yang baik terlebih dahulu harus memperhatikan hal-hal penting, yaitu keterbukaan administrasi sekolah dengan menerima umpan balik dan keterlibatan dalam administrasi sekolah. Kedua, mengukur standar kinerja masing-masing lembaga dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Ketiga, gotong royong untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pelayanan masyarakat sesuai dengan prosedur yang sederhana, murah dan pelayanan yang cepat (Manggar, 2013)

c. Efektivitas

Kinerja dapat diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Efisiensi cenderung menekankan hasil yang berkualitas. Dalam pengelolaan keuangan, prinsip efisiensi dianggap terpenuhi apabila pengelolaan keuangan mampu mengarahkan perekonomian untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuan unit kelembagaan dan hasil kualitasnya sesuai dengan rencana yang telah disepakati.

d. Efisiensi

Efisiensi mengacu pada kualitas hasil operasional. Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara input dan output atau kerja dan hasil. Usaha yang dimaksud menyangkut tenaga, pikiran, waktu, biaya (Rusdiana dan Wardija, 2013).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis dan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan metode wawancara dan studi dokumentasi. Analisa data penelitian dilakukan melalui langkah-langkah: (1) mengumpulkan data, (2) mereduksi data, (3) pemaparan data, dan (4) penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) perencanaan pembiayaan di SDN Rancamanyar 01 terlaksana dengan baik, mulai dari tahap kepala sekolah memberikan arahan sebelum melaksanakan tugas, menghargai pendapat bawahan dan melibatkan pendidik dan tenaga kependidikan dalam penyusunan pada Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), (2) pengorganisasian di SDN Rancamanyar 01 dilaksanakan sesuai dengan hasil perencanaan, seperti penyusunan detail pekerjaan, pembagian kerja, penyatuan pekerjaan dan koordinasi pekerjaan, (3) pelaksanaan di SDN Rancamanyar 01 belum berjalan secara optimal seperti keterlambatan pencairan dana BOS sehingga menyebabkan tidak efektifnya pengelolaan anggaran yang tersedia, dan (4) pengawasan di SDN Rancamanyar 01 sudah berjalan baik, ditandai dengan adanya pemeriksaan secara berkala dalam pengelolaan pembiayaan serta dilaksanakannya audit pembiayaan dari pemerintah daerah khusus dana BOS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan

Berdasarkan hasil wawancara di SDN Rancamanyar 01 bahwa tahap perencanaan adalah langkah pertama dalam mengidentifikasi segala sesuatu yang dibutuhkan sekolah. Rencana tersebut didefinisikan dalam beberapa cara, seperti: kapan, apa, dimanadan bagaimana implementasinya dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dalam perencanaan anggaran sekolah dimulai dengan mengetahui sumber dana dari mana yang

harus diperoleh untuk dapat menyusun konsep biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, operasi proses belajar mengajar, imbalan dan kesejahteraan serta pengembangan sumber belajar dan alat belajar.

Setelah pihak sekolah membuat rencana anggaran dan menghabiskan dana membeli kebutuhan yang diperlukan sekolah tentunya mencaritahu berapa jumlah total dana yang dihabiskan. Sehingga pihak sekolah dapat mengetahui biaya yang dikeluarkan bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah dari yang sudah direncanakan.

Perencanaan keuangan di SDN Rancamanyar 01 dimulai dari menyusun rencana anggaran untuk mendukung operasional dan kegiatan sekolah. Suatu kegiatan yang diatur dengan baik merupakan sebuah perencanaan yang mencakup kegiatan yang akan dilaksanakan dan apa yang akan dicapai, serta langkah-langkahnya, cara-caranya, yang dibutuhkan dalam penerapan energi untuk melaksanakan suatu aktivitas, serta cara untuk sampai pada tujuan. Langkah-langkah dalam kegiatan tersebut tentunya dijadikan pedoman agar setiap perbuatan yang menyimpang dapat diketahui dan segera diperbaiki.

Demikian disampaikan kepala sekolah SDN Rancamanyar 01, terungkap bahwa: Perencanaan pembiayaan pendidikan merupakan kegiatan penganggaran yang dibuat pada kegiatan yang akan dilakukan mendatang sebagai pedoman perencanaan pembiayaan pendidikan untuk melaksanakan suatu program di SDN Rancamanyar 01. Yang dimaksud dalam perencanaan ini yaitu agar pembiayaan yang dikeluarkan dalam segala kegiatan sesuai dengan rencana juga dapat terlaksana sesuai dengan pembiayaan yang sudah direncanakan. Dari tanggapan tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa rencana pendanaan yang ada di SDN Rancamanyar 01 mengarah pada Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan segala hal yang berkaitan dengan alokasi anggaran termasuk ke dalam RKAS. Sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan pengeluaran perhitungan yang sesuai dengan rencana ataupun tidak jauh dari yang sudah dirancang. Rencana anggaran dirumuskan oleh yang bertanggung dalam program kegiatan sekolah maupun seluruh stakeholder sekolah. Selanjutnya seluruh stakeholder dikumpulkan dalam kerangka penyamaan persepsi untuk menyusun program sekolah sesuai program 1 tahunan yang dijabarkan dalam program tahunan sekolah yang kemudian dirapatkan bersama komite sekolah untuk dijadikan RKAS.

Perencanaan pembiayaan dihitung dalam jangka waktu satu tahun di SDN Rancamanyar 01. Jumlah yang diperoleh dari alokasi biaya program yaitu dengan menjumlahkan harga satuan dengan volume satuan. Setelah semua biaya tersebut diperoleh, kemudian dijumlahkan masing-masing komponen dalam satu tahun akan diperoleh total rencana biaya selama satu tahun berikutnya. Adapun komponen anggaran yang menjadi bagian perencanaan keuangan sekolah meliputi: gaji, langganan daya dan jasa, kerumahtanggaan, perjalanan dinas, pengembangan kompetensi lulusan, sistem penilaian, PTK, kurikulum, sarpras manajemen, dan pembinaan kesiswaan, yang dirumuskan dengan merujuk peraturan pemerintah.

Pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan sekolah pada setiap tahunnya adalah RKAS. Dengan begitu penganggaran dalam program, baik program yang umum maupun yang khusus harus berorientasi pada rencana dan juga sesuai. Rencana anggaran sekolah di SDN Rancamanyar 01 disusun di bulan April hingga Juni, sehingga pada tahun ajaran baru di awal bulan Juli kami tinggal melaksanakan saja dengan apa yang telah disusun dalam RKAS. Namun jika ada perubahan program, maka kami hanya perlu melakukan revisi terhadap RKAS tersebut. Setelah RKAS disusun bersama-sama dengan bendahara, guru, dengan begitu RKAS disetujui oleh yang diketahui oleh kepala sekolah serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengesahkan.

Sebelum penyusunan perencanaan pembiayaan (RKAS), dibuat terlebih dahulu draft RKAS yang berisi rencana anggaran jangka pendek, menengah, dan panjang sekolah. Penyusunan ini disusun melibatkan beberapa guru yang diberikan tugas tambahan sebagai penanggung jawab dari kesiswaan, kurikulum serta sarana dan prasarana. Hal ini yang disampaikan oleh kepala SDN Rancamanyar 01 bahwa kepala sekolah dalam

merencanakan pada Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) selalu melibatkan bawahannya dalam merencanakan RKAS, dan selalu menghargai pendapat para bawahannya di dalam rapat. Dalam penyusunan perencanaan tersebut kepala sekolah selalu mengadakan rapat terlebih dahulu.

2. Pengorganisasian

Setelah melakukan perencanaan pembiayaan di SDN Rancamanyar 01 maka dibuatlah penyusunan RKAS yang dimulai dengan pembagian kerja, pemerincian kerja, penggabungan kerja, koordinasi kerja dan pengawasan. Pengorganisasian struktur pembiayaan di SDN Rancamanyar 01 yang dirancang dan bersumber dari evaluasi diri dan program kerja sekolah. Selanjutnya untuk program sekolah yang telah disusun berdasarkan kelompok menurut kepentingan kebutuhan, dan guru sebagai penanggung jawab kegiatan yang menyelenggarakannya dalam bentuk RKAS empat tahun dan satu tahun. Dengan mengurutkan kebutuhan mana yang diprioritaskan/diprioritaskan secara efektif, pengorganisasian pendanaan ini didasarkan pada buku referensi, kemudian dirapatkan dan digunakan sebagai draf RKAS. Dalam pengorganisasian ini sekolah mengadakan pengaturan pembiayaan pendidikan yang sangat terbuka dan dapat menyesuaikan sehingga pembiayaan yang dibutuhkan sekolah dapat mencukupi.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa proses pengorganisasian keuangan pendidikan SDN Rancamanyar 01 melalui uraian tugas, pembagian kerja, konsolidasi kerja, koordinasi kerja dan supervisi. Ada beberapa langkah: Pertama, memerinci pekerjaan yang dilakukan dalam proses pemerincian pekerjaan, dari delapan standar nasional pendidikan yang terdiristandar proses, standar isi, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar kompetensi lulusan, standar pengolahan, standar pembiayaan dan standar penilaian, standar sarana dan prasarana, dengan ditentukannya tugas-tugas apa yang dilakukan Tim penyusun (RKAS) agar dapat merincikan delapan standar tersebut. Kedua, membagikan kegiatan perorangan sebagai tugas tambahan dari seluruh beban kerja. Pembagian kerja ditentukan oleh Kepala Sekolah dengan membagi delapan standar tersebut kepada guru sebagai penanggung jawab. Delapan komponen SNP tersebut meliputi : 1) Sarpras merupakan bidang yang meliputi standar sarana dan prasarana terdiri dari pengadaan buku, pemeliharaan gedung, juga kelengkapan dan pengembangan sarana prasarana sekolah; 2) Kurikulum merupakan suatu bidang yang meliputi standar penilaian dan standar kompetensi kelulusan, yang terdiri dari pengembangan sistem evaluasi, beban studi, pengembangan kompetensi lulusan dan penyelesaian studi ; 3) Humas merupakan bidang yang meliputi standar administrasi yang terdiri dari barang habis pakai, pengembangan administrasi sekolah, langganan daya dan jasa dan manajemen administrasi sekolah; 4) Kesiswaan merupakan bidang yang meliputi standar proses yang terdiri dari melatih siswa dan menetapkan kriteria minimum untuk pembelajaran; 5) Operator sekolah merupakan bidang yang meliputi tenaga kependidikan dan standar pendidik, yang terdiri dari pengembangan trainer dan pengajar, kerja praktek mengenai sunyek tertentu dan business trip ; 6) Bendahara sekolah merupakan bidang yang meliputi standar pembiayaan yang mana guru senior yang bertanggung jawab atas standar isi yang meliputi pengembangan kurikulum dan akomodasi rumah serta biaya rutin honor untuk gur dan karyawan . Ketiga, adalah program kegiatan yang menggabung pekerjaan para tim secara logis juga efektif. Tujuan dari pengelompokan tugas tersebut untuk memudahkan dalam mengalokasikan anggaran pembiayaan. Dan keempat, menentukan mekanisme kerja untuk mengkoordinasikan pekerjaan menjadi satu kesatuan yang harmonis sehingga tujuan sekolah tercapai dengan perencanaan pembiayaan yang sudah dibuat. Bentuk pengkoordinasian tersebut dengan dilakukan rapat koordinasi dari semua pihak, dimana semua tim memaparkan hasil pemerincian kebutuhan sekolah, kemudian dirapatkan dan disepakati bersama tim, untuk disusun menjadi dokumen APBS.

3. Pelaksanaan

Setelah penyusunan perencanaan pembiayaan di SDN Rancamanyar 01 tersusun, maka selanjutnya pelaksanaan dalam RKAS yang sudah direncanakan. Adapun perwujudan pembiayaan dapat dilakukan pada tahun pelajaran baru bertepatan di awal bulan Juli. Langkah awal yang dilakukan yaitu pengeluaran untuk pembiayaan barang dan jasa, seperti pembayaran honor guru dan bahan pelajaran. Sebelum melakukan proses kegiatan yang sesuai dengan rencana, maka didahului langkah-langkah yang strategis dalam pembiayaan pendidikan agar pelaksanaan mendapatkan hasil yang optimal dan berjalan secara maksimal.

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari wawancara menjelaskan bahwa pelaksanaan pembiayaan pendidikan di SDN Rancamanyar 01 sudah berjalan sesuai dengan tahapan kegiatan yang diberlakukan, yang mengacu pada Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Dalam hal ini dapat dibuktikan yaitu alokasi biaya dalam bentuk honor guru, honor struktural, peralatan ATK, kurikulum, kegiatan siswa, dan perawatan sarana dan prasarana. Selain itu di SDN Rancamanyar 01 juga dalam pelaksanaan manajemen keuangan merupakan tanggung jawab yang sangat komprehensif untuk pengeluaran keuangan. Dalam proses pelaksanaan setiap kegiatan yang dianggarkan harus disetujui oleh kepala sekolah dan harus dibuat usulan kegiatan terlebih dahulu. Rincian dana yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut diajukan dalam bentuk proposal. Selanjutnya meminta persetujuan dari Kepala Sekolah, barulah bendahara sekolah boleh mengeluarkan uang sesuai yang ada dalam proposal jika sudah mendapat persetujuan dari kepala sekolah. Akan tetapi, bendahara sekolah agar dapat memilih kegiatan yang penting terlebih dahulu untuk pengeluaran pembiayaan.

Kepala SDN Rancamanyar 01 pun menjelaskan bahwa penyaluran dana pendidikan dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas. Artinya sekolah mengetahui bahwa kebutuhan apa saja yang harus didahulukan dan mendesak. Jika terjadi kekurangan anggaran secara tiba-tiba maka merealokasi dana atau memindahkan dana yang belum terpakai dalam waktu dekat. Kadang alokasi dana mengalami perubahan secara mendadak, disebabkan terlambatnya dana yang masuk dan hal ini tidak sesuai dengan rencana awal. Adanya keterlambatan tersebut mengakibatkan kekurangan di pos-pos tertentu. SDN Rancamanyar 01 tentunya memiliki laporan yang jelas, yang dalam hal ini tertuang dalam pada Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Laporan yang disajikan di sekolah ini telah sesuai dengan standar yang ditetapkan yaitu dalam hal ini pada Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Semua penerimaan dan pengeluaran sekolah dicatat dan dibukukan dalam Buku Kas Umum (BKU) dan buku kas pembantu tunai dengan jelas, dimasukkan ke dalam buku besar dan dibuat ringkasan tanggung jawab anggaran yang menjadi dasar audit atau pemeriksaan. Laporan pembiayaan sekolah disajikan melalui pada Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah pada ajaran awal tahun.

4. Pengawasan

Dalam kegiatan pengawasan anggaran pembiayaan di SDN Rancamanyar 01 menunjukkan yang perlu diawasi dalam hal pembiayaan yaitu pembukuan yang jelas, baik dari segi hal pemasukan dan pengeluarannya. Pihak sekolah sudah mendapatkan koordinasi terlebih dahulu dari tim pengawas kabupaten. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada akhir tahun ajaran serta pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas kabupaten tidak memiliki jangka waktu yang ditentukan. Selain itu, kepala sekolah juga secara rutin memantau pelaksanaan dana pendidikan setiap tiga bulan sekali dengan memeriksa buku kas bendahara sekolah. Adapun prosedur pengawasan pembiayaan yang dilakukan di SDN Rancamanyar 01 yaitu: melakukan verifikasi pembelian barang dan jasa sesuai dengan APBS, memverifikasi tingkat pengeluaran dan pendapatan setiap bulan, dan memverifikasi bukti fisik pembelian berupa kuitansi dan berkas lainnya. .

Komite sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota pengawas sekolah selalu melakukan pengawasan internal khususnya dalam pengolahan dan BOS. APBS

dilaksanakan setahun sekali oleh tim pemantau independen dalam hal ini tim Direktorat Pengembangan SD, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar. Juga melibatkan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan Nasional, Instansi pengawas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pembiayaan pendidikan di SDN Rancamanyar 01.

Proses kegiatan pembiayaan dapat berjalan tanpa adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya dan dapat terlaksanakan karena ada dalam pengawasan pembiayaan. Sekaligus mengevaluasi pelaksanaan APBS, dan juga sebagai tindakan pencegahan kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan. Hal ini digunakan agar desain sebelumnya dapat dipakai kembali untuk tahun pelajaran yang akan datang, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan yang akan digunakan dengan adanya penambahan dan perubahan pada program sekolah. Model anggaran belanja sekolah tahun ini akan dilaksanakan juga pada tahun depan dan tentunya dengan perbaikan dan penyempurnaan sesuai program sekolah, menambah program-program baru yang direncanakan dan dapat dibiayai dari anggaran sekolah. Sedangkan untuk mengenai penilaian APBS, yang dilaksanakan sekali pada setiap tahun oleh kepala sekolah, dan prosedur pengawasan yang dilakukan sekolah adalah mulai menyamakan pengeluaran dan pemasukan dari buku kas, memeriksacatat pengeluaran dalam bentuk fisik, serta evaluasi, dan penyusunan SPJ keuangan.

Kepala SDN Rancamanyar 01 juga menjelaskan bahwa segala penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah dibukukan sesuai petunjuk pembukuan, diantara pembukuan yang kami lakukan ada beberapa jenis yaitu: Buku Kas Umum (BKU), buku kas pembantu tunai dan buku pembantu pajak. Buku kas umum sudah tersedia dan selalu aktif digunakan oleh bendahara. Buku ini memuat seluruh transaksi pengeluaran keuangan sekolah secara rinci dengan setiap terjadi transaksi akan ditulis sesuai tanggal terjadinya transaksi tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi manajemen sekolah dalam pengelolaan pembiayaan di SDN Rancamanyar 01 dalam penyusunan anggaran sesuai dengan teori manajemen yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terlaksana dengan baik. Perencanaan pembiayaan terlaksana dengan baik yang dilakukan di SDN Rancamanyar 01. Hal ini diawali dengan kehadiran kepala sekolah dalam memberikan arahan sebelum pembagian tugas serta dapat menghargai setiap pendapat dari bawahannya (tenaga kependidikan dan pendidik). Selain tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dilibatkan oleh kepala sekolah dalam penyusunan pada Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Melalui perencanaan yang baik maka kemudian pengorganisasian pembiayaan di SDN Rancamanyar 01 pun dilaksanakan sesuai dengan hasil perencanaan yang ditetapkan sebelumnya seperti penyusunan detail pekerjaan, pembagian kerja, penyatuan pekerjaan dan koordinasi timnya. Para pemegang penanggung jawab telah melakukan beberapa aspek yang telah dilaksanakan sehingga dalam pengelolaan sumber pembiayaan di sekolah dapat terealisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada sebelumnya. Kemudian dalam pelaksanaan pembiayaannya terdapat faktor yang menyebabkan implementasi pembiayaan belum berjalan secara optimal yaitu, keterlambatan pencairan dana yang bersumber dari anggaran Pemerintah Daerah atau dana BOS sehingga menyebabkan tidak efektifnya pengelolaan anggaran yang tersedia. Terakhir dalam pengawasan pembiayaan di SDN Rancamanyar 01 dalam implementasinya aktivitas pengawasan sudah dilaksanakan dengan begitu baik. Kegiatan ini ditunjukkan dari adanya pengawasan pada kegiatan pembiayaan. Kemudian adanya koordinasi secara intens antara pihak sekolah dan tim pengawas pemerintah daerah dalam melaporkan hasil kegiatan pembiayaan sehingga hasilnya berjalan secara efektif dan efisien.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka rekomendasi yang berkaitan dengan implementasi manajemen sekolah dalam pengelolaan pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Kepada seluruh kepala sekolah harus segera mengawasi kegiatan pembiayaan di sekolah, khususnya dalam hal pembukuan alur masuk dan pengeluarannya. Selain itu juga menentukan kapan kegiatan pelaksanaan pengawasan dan dilakukan secara berkala untuk menilai keefektifan kegiatan pembiayaan di sekolah.
2. Komite sekolah juga diharapkan melakukan pemantauan tidak hanya pada saat rapat, namun sebaiknya juga melakukan pengecekan pembukuan dan kelengkapan bukti transaksi yang di buat oleh sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Q. (2018). *Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan dalam Al-Qur'an*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Akdon dkk. (2015). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Arwildayanto, dkk. (2017). *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Widya Padjadjaran
- Dian, W. (2012). *Pengantar Manajemen*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fadhli, M. (2017). Manajemen peningkatan mutu pendidikan. *Tadbir: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 1(2), 215-240.
- Fatonah, N. (2021). Manfaat Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Mutu Proses Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan UNIGA*, 15(2), 474-483.
- Fattah, N. (2006). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Handoko, T. (2003). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Hariyanto, M., Purnama, S., Andari, D., & Mila, A. Z. (2023). MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN. *INOVASI: Jurnal Ilmiah Pengembangan Pendidikan*, 1(2), 1-9.
- Indar, D. (1995). *Perencanaan Pendidikan (Strategi dan Implementasinya)*. Surabaya: Karya Abditama.
- Iskandar, J. (2019). Implementasi sistem manajemen keuangan pendidikan. *Idarah*, 3(1), 114-123.
- Kusumadewi, R. F. (2015). Pembiayaan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 2(1), 43-64.
- Lisnawati, R. (2017). Fungsi Manajemen Kepala Sekolah, Motivasi, dan Kinerja Guru. *JP (Jurnal Pendidikan): Teori Dan Praktik*, 2(2), 143-149.
- Maujud, F. (2018). Implementasi fungsi-fungsi manajemen dalam lembaga pendidikan islam (studi kasus pengelolaan madrasah ibtidaiyah islahul muta'allim pagutan). *Jurnal Penelitian Keislaman*, 14(1), 31-51.
- Moleong, L. (2013). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2009). *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurhayati, N., Nasir, M., Mukti, A., Safri, A., Hasibuan, L., & Anwar, K. (2022). MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN MUTU LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM. *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, 3(2), 594-601.
- Riadi, A. (2016). Pendidikan Karakter di Madrasah/Sekolah. *Ittihad*, 14(26), 1-10.
- Riyanto. (2007). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif*. Surabaya: Unesa Press.
- Rusdiana & Wardija. (2013). *Manajemen Keuangan Sekolah*. Bandung: Arsad Press.
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Setiyati, S. (2014). Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah, motivasi Kerja, dan budaya sekolah terhadap kinerja guru. *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, 22(2), 200-206.
- Syaodih, N.S. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.